

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

NANDA ASHABUL FIKRI

NIM: 15622149



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

NANDA ASHABUL FIKRI

NIM: 15622149

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : NANDA ASHABUL FIKRI
NIM : 15622149

Menyetujui :

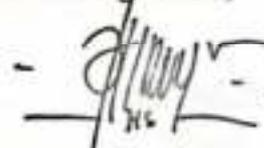
Pembimbing Pertama,



Budi Zulfachri, S.Si., M.Si

NIDN. 1028067301/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.

NIDN. 1029127801/Lektor

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : NANDA ASHABUL FIKRI

NIM : 15622149

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

NIDK. 8833900016/Asisten Ahli

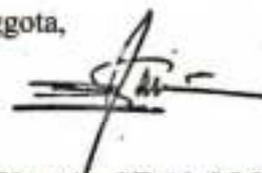
Sekretaris,



Rachmad Chartady, SE., M.Ak

NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Anggota,



Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si,CA

NIDK. 1020037101 / Lektor

Tanjungpinang, Januari 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : NANDA ASHABUL FIKRI
NIM : 15622149
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.25
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja
Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil dari karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penyusun,



Nanda Ashabul Fikri
NIM : 15622149

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah walahaula walaquwwata
illah billah sujud syukur kusembahkan **kepada Mu ya Allah** yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

Shalawat beserta salam kuhadiahkan kepada Nabi **Muhammad SAW.**

Ku persembahkan sebuah karya skripsi ini untuk keluargaku tercinta
terutama kepada Ayah dan Ibu tercinta.

Bapak Drs.Abdurrahman Abbas

Ibu Nurasia S.Pd.I

Yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa untuk
kesuksesan anaknya. Dan juga dengan bangga ku persembahkan skripsi
ini kepada Kampusku **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)**

Pembangunan Tanjungpinang.

HALAMAN MOTTO

Seseorang duduk ditempat teduh hari ini karena

Seseorang telah menanam pohon sejak dulu

-Warren Buffet

Jika kamu tidak menyerah

kamu masih memiliki kesempatan

-Jack Ma

Kesuksesan adalah bagian dari kehidupan

Dan kehidupan itu kamu yang melaksanakan

-Ahmad Sahroni

Tidak masalah berapa banyak kesalahan yang kamu lakukan

atau berapa lambat kemajuan yang kamu buat

Kamu masih ada didepan mereka yang tidak berani

mengambil tindakan

-Toni Robbins

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang “** skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih pada berbagai pihak yang telah membantu mulai dari persiapan penulis hingga selesainya penulisan ini kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S,E. M. Ak, CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S,E, M.Si. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S,E, Ak, M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
5. Bapak Hendy Satria, S.E, M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang dan dosen pembimbing II yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budi Zulfachri, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing I penulis yang sangat membantu dalam menyusun skripsi ini, dengan kesediaan beliau ditengah-tengah kesibukannya yang dapat meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kritik dan saran kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis dari mulai mahasiswa Akuntansi sampai akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepala BPKAD Tanjungpinang beserta Staf Bidang Akuntansi dan pelaporan yang telah memberikan ijin dan arahan selama melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Terimakasih kepada Orangtuaku , yang telah banyak mendoakan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan Kursia, Mail, Desi, Susan, Zahrun yang telah mendukung setiap prosesnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memperluas wawasan penulis sebagai proses pembelajaran diri.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penulis,

Nanda Ashabul Fikri
15622149

DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEJUTUAN	
HALAMAN PENGUJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	7
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	9
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
2.1.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	25

2.2 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	27
2.2.3 Rasio Aktivitas.....	28
2.2.4 Rasio Pertumbuhan	29
2.2.5 Rasio Efektivitas.....	30
2.2.6 Rasio Efisiensi.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum (Gambaran Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang).....	40
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	40
4.1.2 Batas Administrasi.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Tanjungpinang.....	42
4.1.4 Tugas Pokok Fungsi dan Fungsi BPKAD Tanjungpinang	44
4.2 Data Khusus.....	68
4.2.1 APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.....	68
4.2.2 Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.....	69
4.2.3 Analisis Data.....	71
4.2.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	71
4.2.3.2 Rasio Aktivitas.....	73
4.2.3.3 Rasio Pertumbuhan.....	75
4.2.3.4 Rasio Efektivitas.....	77
4.2.3.5 Rasio Efisiensi.....	78
4.2.4 Pembahasan.....	79

4.2.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	80
4.2.4.2 Rasio Aktivitas.....	82
4.2.4.3 Rasio Pertumbuhan.....	84
4.2.4.4 Rasio Efektivitas.....	85
4.2.4.5 Rasio Efisiensi.....	87

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Tanjungpinang.....	42

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	28
Tabel 2.2	Kerangka Pemikiran.....	32
Tabel 4.1	APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2014.....	68
Tabel 4.2	APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016.....	68
Tabel 4.3	APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2018.....	69
Tabel 4.4	Realisasi APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2014.....	69
Tabel 4.5	Realisasi APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016.....	70
Tabel 4.6	Realisasi APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2018.....	70
Tabel 4.7	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.....	72
Tabel 4.8	Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018(Belanja Operasi).....	73
Tabel 4.9	Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018(Belanja Modal).....	74
Tabel 4.10	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018(Pertumbuhan PAD).....	75
Tabel 4.11	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 (Pertumbuhan Pendapatan).....	76
Tabel 4.12	Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.....	77
Tabel 4.13	Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Penelitian Dari BPKAD Kota Tanjungpinang
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2013
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2014
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2015
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2016
- Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2017
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang Tahun 2018
- Lampiran 8 : *Plagiarism check*

ABSTRAK

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Nanda Ashabul Fikri.15622149. Akuntansi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
nandaashabulfikri@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018 dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Aktivitas, (3) Rasio Pertumbuhan, (4) Rasio Efektivitas, (5) Rasio Efisiensi.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan rumus : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kota Tanjungpinang dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikatakan masih tergolong Rendah Sekali atau dalam kategori pola hubungan intruktif dengan rata rata rasionya sebesar 18,28% (2) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah menunjukkan masih tingginya tingkat Belanja Operasi sebesar 83,45% dibandingkan Belanja Modal sebesar 16,53% (3) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan positif terhadap realisasi PAD sebesar 9,37% dan realisasi Total Pendapatan Daerah sebesar 2,50% (4) Rasio Efektivitas dapat dikatakan sudah efektif dengan rata rata rasionya sebesar 104,96% (5) Rasio Efisiensi dapat dikatakan tidak efisien karena rata rata rasionya sebesar 100,97%.

Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Januari 2020

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

(x + 97 + 15 Tabel + 1 Gambar + 9 Lampiran)

Referensi : 13 Buku(2008-2016) + 5 jurnal + 6 peraturan pemerintah

Dosen Pembimbing 1 : Budi Zulfachri, S.Si., M.Si.

Dosen Pembimbing 2 : Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA

ABSTRACT

Financial Rasio Analysis to Assess Government Financial Performance City Of Tanjungpinang

Nanda Ashabul Fikri.15622149. Akuntansi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
nandaashabulfikri@gmail.com

This study aims to determine the regional financial performance of the city government of Tanjungpinang year 2013-2018 judging from: (1) Rasio of regional independence, (2) ratio of activity, (3) ratio of growth, (4) Effectiveness ratio, (5) Efficiency ratio.

The type of research conducted is qualitative descriptive research. This research was conducted in the Board of Finance and regional assets Management (BPKAD) in Tanjungpinang.

The method of data collection used is by way of documentation. While the data analysis technique used is by formula: regional financial self-reliance ratio, activity ratio, growth ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio.

The results of the analysis showed that the financial performance of the city of Tanjungpinang is seen from (1) the regional financial independence ratio can be said to be relatively low or in the category of instruction patterns with an average ratio of 18.28% (2) The ratio of regional financial activity shows the high operating expenditure rate of 83.45% compared to the capital expenditure of 16.53% (3) the regional financial growth ratio experienced a positive growth of the realization PAD by 9.37% and Realization of Total Local revenue of 2.50% (4) The effectiveness ratio can be said to be effective with a ratio of 104.96% (5) The efficiency rate can be said to be inefficient because of the average ratio of 100.97%.

*Thesis. High School of Economic Sciences (STIE) the development of
Tanjungpinang, January 2020*

*Keywords: regional financial performance, rasio of regional independence,
activity ratio, growth ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio
(x + 97 + 15 Tables + 1 image + 9 attachments)*

Reference : 13 books (2008-2016) + 5 journals + 6 Government Regulations

Supervisor 1 : Budi Zulfachri, S.Si., M.Si.

Supervisor 2 : Hendy Satria, S.E., M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Dengan peningkatan layanan tersebut akan berdampak dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh kontribusi dari beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan pendapatan asli daerah, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi kerja, dan lainnya. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor yang strategis dan memiliki potensi pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur yang memacu pertumbuhan ekonomi. Peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan akan sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pengelolaan pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut juga APBD yang merupakan alat dalam penetapan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber perkembangan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, alat untuk mobilisasi pegawai dan alat koordinasi aktivitas dari berbagai unit kerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut dibuat sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah mempunyai gambaran jelas apa saja yang diterima sebagai pendapatan daerah dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan daerah selama satu tahun.

Kunci keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dengan tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah tersebut diimplementasikan dalam suatu sistem yang terintegrasi setiap tahun dalam APBD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019). Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam rangka menilai akuntabilitas pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas tidak hanya tentang bagaimana uang masyarakat tersebut dibelanjakan, akan tetapi tentang kemampuan pemerintah daerah menunjukkan

bahwa uang masyarakat tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif. Yang dimaksud Efisien adalah mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat tersebut dalam menghasilkan output yang maksimal, sedangkan efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target untuk keperluan masyarakat (Mardiasmo, 2013).

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. Tidak hanya sebagai bahan evaluasi saja, tapi karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka analisis laporan keuangan juga digunakan untuk menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut agar mudah dipahami. Dengan kata lain analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara membaca laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang tersedia dalam laporan keuangan.

Salah satu teknik menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Menurut (Halim, 2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Artinya semakin tinggi tingkat Rasio Kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Dan untuk Rasio Aktivitas menggambarkan pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi anggaran pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Rasio

pertumbuhan menggambarkan kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negative selama satu tahun atau beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2010).

Rasio Efektivitas menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan berdasarkan kemampuan daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan.

Kota Tanjungpinang sebagai salah satu kota sekaligus merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau yang pemerintahannya dipimpin oleh Walikota dan wilayah kota tanjungpinang yang dibagi menjadi empat kecamatan yaitu: Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang ditemukan masalah. Permasalahannya yaitu terjadinya defisit anggaran tahun 2015 sebesar lebih kurang 58 Milyar.

Defisit ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya target penerimaan daerah tidak tercapai, masih tingginya belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga perlu dilakukannya rasionalisasi anggaran. Dari permasalahan diatas, pemerintah Kota Tanjungpinang harus melakukan pembenahan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran.

Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan penghematan dalam sisi pembiayaan daerah harus diperhatikan agar permasalahan defisit anggaran ini tidak terulang kembali. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat

suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kinerja Keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2013-2018 ?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Aktivitas pada tahun 2013-2018 ?
3. Bagaimanakah Kinerja Keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Pertumbuhan pada tahun 2013-2018 ?
4. Bagaimanakah Kinerja Keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Efektivitas pada tahun 2013-2018 ?
5. Bagaimanakah Kinerja Keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Efisiensi pada tahun 2013-2018 ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian lebih terfokus terhadap apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Periode yang diteliti adalah 2013-2018. Penelitian ini mengambil data dari

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang . Data yang diambil merupakan Laporan Realisasi Anggaran APBD periode 2013 sampai dengan 2018 sebagai sumber analisis dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian :

1. Untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2013 – 2018.
2. Untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Aktivitas pada tahun 2013 – 2018.
3. Untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2013 – 2018.
4. Untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Efektifitas pada tahun 2013-2018.
5. Untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Rasio Efisiensi pada tahun 2013-2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi landasan pengembangan atau referensi bagi peneliti selanjutnya atas topik mengenai permasalahan ini, serta dapat memperbanyak sumber pustaka yang telah ada.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan dan gambaran untuk menentukan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki Kinerja Keuangan menjadi lebih baik.
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola dana masyarakat oleh pemerintah daerah.
- c. Bagi Peneliti penelitian ini dapat menjadi ruang pembelajaran yang menjadi nilai positif dan membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkenaan dengan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai acuan pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian ini

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian yang dilakukan ini terbagi dalam lima bab, terdiri dari beberapa sub-bab Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengungkapkan latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian oleh penulis, yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, serta lokasi jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi BPKAD Kota Tanjungpinang, menjelaskan hasil dan pembahasan objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran-saran dan juga penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam makna singkat, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh karena itu keuangan daerah identik dengan APBD. Keuangan Daerah berdasarkan (Republik Indonesia, 2011) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 Nomor 6, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut (Halim, 2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang juga dapat dinilai dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, dapat dijadikan kekayaan daerah selama tidak dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengertian diatas dalam keuangan daerah ditemukan dua unsur penting yaitu : 1) Semua hak berarti hak dalam memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku menambah kekayaan daerah; 2) Kewajiban daerah dimaksud berupa kewajiban membayar atau tagihan dalam rangka pembiayaan daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut (Yani, 2009) ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyanggarkan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berbentuk uang, barang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang bernilai uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh kepada perkembangan suatu daerah untuk mengetahui target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu perlu dikelola secara efektif dan efisien atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Didalam Ketentuan Umum pada (Republik Indonesia, 2019) PP No.12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tanggungjawab, pengawasan daerah. Terdapat dua kepengurusan yang terkandung dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kepengurusan umum dan kepengurusan khusus. Adapun kepengurusan umum berhubungan dengan administrasi sedangkan kepengurusan umum disebut juga kepengurusan bendaharawan. Menurut (Mahmudi, 2010) diperlukan tahapan-tahapan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah supaya pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaatnya bagi masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rancangan pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah untuk melaksanakan desentralisasi dalam periode tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua pendapatan bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Begitu pula semua pengeluaran untuk melaksanakan desentralisasi mengacu pada jumlah yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga diperlukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan dalam pengelolaannya. Periode tahun APBD sama dengan periode tahun APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Agar pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sesuai kerangka waktu tersebut.

APBD dibuat berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja pada rencana pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang telah diperhitungkan dan terukur secara rasional dari setiap sumber pendapatan. Pendapatan dalam realisasinya boleh melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi anggaran belanja tidak boleh melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pengeluaran harus didukung kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pejabat dilarang melakukan kegiatan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Berikut ini uraian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD):

- 1) Pengertian APBD, 2) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- 3) Mekanisme Penyusunan APBD:

1. Pengertian APBD

Menurut (Republik Indonesia, 2014) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut (Badrudin, 2012) APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam waktu satu tahun, dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD yang tertuang dalam peraturan perundangan atau disebut Peraturan Daerah. Menurut (Mardiasmo, 2009) merupakan instrument kebijakan utama pemerintah daerah sebagai anggaran daerah yang menduduki posisi sentral pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah berguna dalam menentukan jumlah penerimaan dan pengeluaran, serta membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan, menurut (Nurlan, 2008) merupakan dokumen formal hasil kesepakatan pihak eksekutif dan pihak legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan daerah yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadinya defisit atau surplus terhadap anggaran.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan, namun dapat juga

terjadi disiapkannya anggaran dalam waktu kurang atau lebih dari satu tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah mencakup seluruh penganggaran pendapatan dan pengeluaran yang dibahas dan disetujui antara lembaga eksekutif dan legislatif yang ditetapkan didalam peraturan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan pemerataan daerah.

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD berdasarkan (Republik Indonesia, 2006) Permendagri No.13 tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

I. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Menurut Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan yang sah.

- 1) Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank dan non bank, dan penyertaan modal/investsi kepada pihak ketiga.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan Bunga dan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang kemudian dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan (Republik Indonesia, 2004) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dan perimbangan yang meliputi :
- 1) Hibah Tidak Mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintah daerah. Hibah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

- 2) Dana Darurat dari Pemerintah. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten atau Kota. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya.
- 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008) tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Penyesuaian Otonomi Khusus bagi provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.
- 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota

dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

II. Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri pengeluaran dan pembiayaan. Menurut (Republik Indonesia, 2014) UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 No.36 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut (Republik Indonesia, 2018) Permendagri No.38 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak serta jaminan sosial. Selanjutnya, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangan masing-masing daerah. Sehubungan dengan itu, penggunaan APBD difokuskan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas SDM, pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja Daerah

dibagi atas dua yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara berkala kepada pegawai yang bersifat tetap dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lain yang umumnya diperlukan secara berkala. Belanja tidak langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bunga dianggarkan guna pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi digunakan sebagai anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu supaya harga jual produk/jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditempatkan dalam naskah hibah daerah.
- 5) Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 6) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kab/kota atau pendapatan kab/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Bantuan Keuangan dianggarkan sebagai bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - 8) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- b. Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal dianggarkan sebagai anggaran pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya

III. Pembiayaan Daerah

Menurut (Republik Indonesia, 2014) UU No. 23 tahun 2014 Indonesia tentang Pemerintah Daerah pasal 1 No. 37 Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan meliputi penggunaan SiLPA tahun lalu, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembuatan Dana Cadangan, Penerimaan Modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok Utang dan Pemberian pinjaman daerah.

3. Mekanisme Penyusunan APBD

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang berfokus pada capaian kerja dari rencana alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama pihak Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 12 Tahun 2019).

Dalam penyusunan anggaran, mekanisme informasi merupakan upaya pencapaian visi, misi, yang telah ditetapkan dalam renstra daerah. Penyusunan rencana kerja harus sudah memuat secara terperinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran yang akan dihasilkan, sumber daya yang diperlukan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh rancangan program kerja masing-masing SKPD diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia Eksekutif selanjutnya menganalisis dan menyeleksi rancangan program masing-masing SKPD sesuai yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dalam draf Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya dibahas dengan pihak Legislatif (Permendagri No.13 Tahun 2006).

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah menjadi pengukur dalam menilai kemampuan

pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur terhadap kesuksesan yang akan dicapai suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut (Bastian, 2010) kinerja adalah gambaran capaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, visi, misi organisasi. Kinerja keuangan daerah menjadi pengukur dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut (Nordiawan, 2010) Pengukuran kinerja adalah bentuk proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target yang direncanakan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat capaian kerja pada bidang keuangan daerah yang mencakup anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan indikator keuangan. Pengukuran kinerja menjadi sebuah jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas.

Dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas dan perencanaan operasional yang terukur, maka dengan adanya indikator keuangan diharapkan tersedia dalih yang cukup untuk mengatakan bahwa pelaksanaan program berhasil atau tidak.

Menurut (Mahsun, 2011) Indikator-indikator sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan, misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada

- d. Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses, misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b. Rata-rata yang diperlukan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan jasa
 - 3) Indikator Keluaran, misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
 - 4) Indikator Hasil, misalnya :
 - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
 - 5) Indikator Manfaat, misalnya :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
 - 6) Indikator Dampak, misalnya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur-unsur Laporan Pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat APBD. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah satuan angka yang memperlihatkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi. Belum banyaknya penggunaan analisis rasio khususnya pada APBD dikarenakan

belum adanya kesepakatan teori dan kaidah pengukuran. Meskipun demikian, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan dalam rangka transparansi pengelolaan uang publik.

2.1.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja dalam pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian hasil dari kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Menurut (Sinambela, 2012) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai tiga tujuan dan manfaat, yaitu:

- 1) Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus tujuan dan sasaran unit kerja.
- 2) Mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Melaksanakan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi antar kelembagaan.

Adapun alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai indikator pengukur dalam menilai keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, dan melihat sejauh mana tingkat pertumbuhan belanja pemerintah daerah.

2.2 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Rasio Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dipungut dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut (Mahsun, 2011) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Sedangkan menurut (Halim, 2012) Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Sehingga, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio pemerintah daerah adalah suatu alat untuk menganalisa masalah laporan keuangan dengan membandingkan capaian satu periode ke periode lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang digunakan adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

2.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Halim, 2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio, maka ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah Rasio, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sesuai dengan keputusan Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam (Mahmudi, 2011) sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%)	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Mahmudi 2011

- 1) Pola hubungan Instruktif , yaitu peranan pemerintah pusat lebih besar daripada kemandirian pemerintah daerah.

- 2) Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu pemerintah daerah dianggap sudah benar-benar mampu dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.3 Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja Operasi dan belanja Modal secara optimal, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan (Investasi) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Menurut (Mahmudi, 2016) proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan daerah cenderung memiliki proporsi belanja operasi yang tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat pendapatannya yang rendah. Sedangkan, Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% .

Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Rasio Aktivitas Belanja Modal didalam (Mahmudi, 2016) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Operasi)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Modal)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

2.2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negative (Mahmudi, 2010). Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecendrungan (trend) rasio meningkat. Tetapi jika pertumbuhan pendapatannya negatif, maka akan menunjukkan penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pertumbuhan Tahun } t - \text{Pertumbuhan Tahun}(t - 1)}{\text{Pertumbuhan Tahun}(t - 1)}$$

Rasio Pertumbuhan tidak hanya berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa lalu tetapi juga berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut (Halim, 2012) rasio

pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total Pendapatan Daerah, PAD dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya positif. Artinya, bahwa daerah tersebut telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya keuangannya.

2.2.5 Rasio Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2009) Rasio Efektivitas pada dasarnya adalah hubungan antara keluaran terhadap tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2016) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio Efektivitas dalam (Mahmudi, 2016) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah didalam (Mahsun, 2011) adalah :

- Jika nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- Jika nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.2.6 Rasio Efisiensi

Menurut (Halim, 2012) Rasio efisiensi merupakan rasio yang

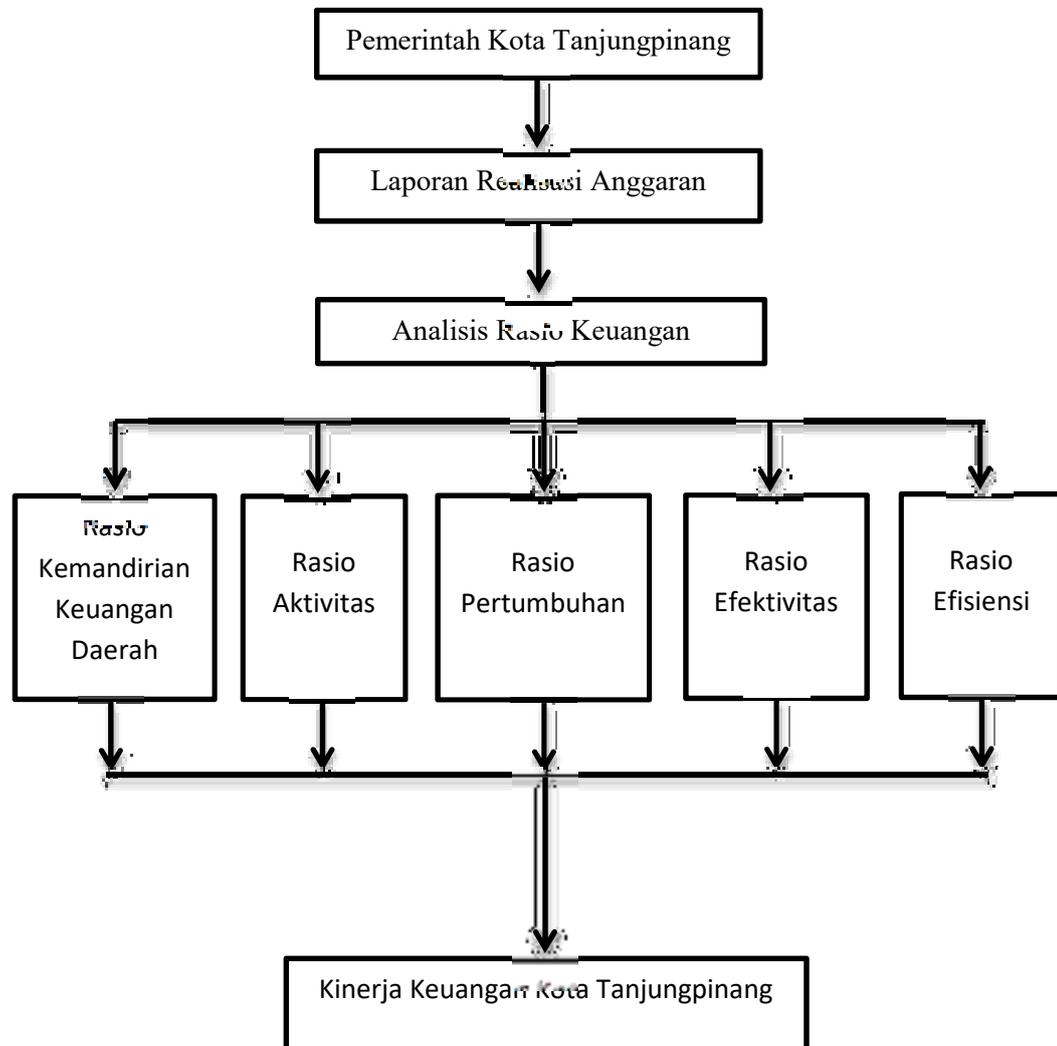
menggambarkan perbandingan antara besarnya total realisasi belanja daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau 100%. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) rasio efisiensi dilakukan dengan membandingkan anatara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila hasil kerja dicapai dengan penggunaan dana serendah-rendahnya. Rasio Efisiensi dalam (Halim, 2012) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan yang diterimanya agar dapat diketahui apakah efisien atau tidak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menggambarkan objek penelitian dilakukan pada pemerintah kota Tanjungpinang dengan menggunakan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Lalu kemudian melakukan analisis rasio dengan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi. Dan menyimpulkan hasil analisis terhadap Kinerja Keuangan Kota Tanjungpinang.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Kotan Tanjungpinang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu yang berbeda diantaranya :

1. (Sumenge, 2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kab. Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Hasil penelitian tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belnja BAPPEDA Minahasa Selatan 2008-2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah terjadi 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. BAPPEDA Minahasa Selatan menilai bahwa kegiatan yang diprogramkan telah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif.
2. (Bisma dan Susanto, 2010) dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah prov. Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam

melaksanakan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian Daerah sangat kurang. Efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun Rasio Efisiensi menunjukkan hasil Tidak Efisien.

3. (Daling, 2013) dengan judul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga pemerintah Kab. Minahasa melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA surplus.
4. (Triyono, 2013) dengan judul Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan kabupaten Sukoharjo berdasarkan rasio keuangan pada APBD tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah, rasio pertumbuhan menunjukkan hasil positif dan Rasio derajat desentralisasi yang rendah.

5. (Lazyra, 2016) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Medan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan dan tingginya belanja daerah, hingga melebihi dari yang dianggarkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Saryono, 2010) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keitimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2013) yang dimaksud penelitian Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah tersedia, dikutip oleh peneliti untuk kepentingan penelitian, (meliputi data yang diperoleh dari perusahaan/instansi berupa laporan keuangan, struktur organisasi, dan lainnya). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen resmi data runtutan waktu (*time series*) yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018. Sumber

data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan sumber data dari laporan keuangan pada tahun 2013-2018 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang kemudian dilakukan pencatatan dan perhitungan. Penelitian ini juga dilakukan studi pustaka dengan menelaah maupun mengutip dari sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan teori penelitian.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan dengan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data dari laporan keuangan pada tahun 2013-2018 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk menilai Kinerja Keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Operasi)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Modal)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pertumbuhan Tahun } t - \text{Pertumbuhan Tahun}(t - 1)}{\text{Pertumbuhan Tahun}(t - 1)}$$

4. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

Langkah-langkah yang dibuat dalam teknik analisis data ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dari objek penelitian yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Menghitung data dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kinerja Keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dan dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan, semakin tinggi presentase atau perbandingan tersebut, maka semakin tinggi prestasi.

Daftar Pustaka

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma dan Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran 2003-2007*.
- Daling, M. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lazyra, K. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Erlangga.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi keti). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurlan, D. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (2006).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001* (2008).
- Republik Indonesia. *Permendagri No 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (2011).

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).

Republik Indonesia. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 (2018).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumenge, A. S. (2013). Analisis Eektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Minahasa Selatan.

Triyono, H. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011.

Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)



Nama : Nanda Ashabul Fikri
Nim : 15622149
Tempat/Tgl.Lahir : Tanjungpinang, 8 Desember 1997
Agama : Islam
No.Hp : 0813 7113 0511
Email : Nandaashabulfikri@gmail.com
Alamat Rumah : Jalan Cenderawasih km.8 Kp. Mekar Baru
RT/RW :002/003 Kec.Tanjungpinang Timur
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 011 Bukit Bestari
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang
3. SMAN 2 Tanjungpinang
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Tanjungpinang, Januari 2020

Nanda Ashabul Fikri

15622149